



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 149 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 88 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Dinas setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029;
- b. sebagai panduan pelaksana teknis kegiatan dan subkegiatan prioritas pembangunan daerah, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kerja Dinas meliputi:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
dan

BAB V : Penutup.

- (2) Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi unit organisasi yang terdiri atas:

- a. unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. unsur pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan;
 2. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
 3. Bidang Hubungan Industrial;
 4. Bidang Trnasmigrasi

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PERUBAHAN RENJA-PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Rencana Kerja Dinas dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 199

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 149 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN
2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Terkait dengan posisi atau kedudukan dan fungsi, Renja-PD merupakan salah satu dokumen perencanaan perencanaan PD, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); RPJMD; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan dokumen perencanaan PD, terdiri atas Renstra-PD dan Renja-PD. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.

Berdasarkan ketentuan Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja-PD disusun melalui proses beberapa tahapan, sebagai berikut:

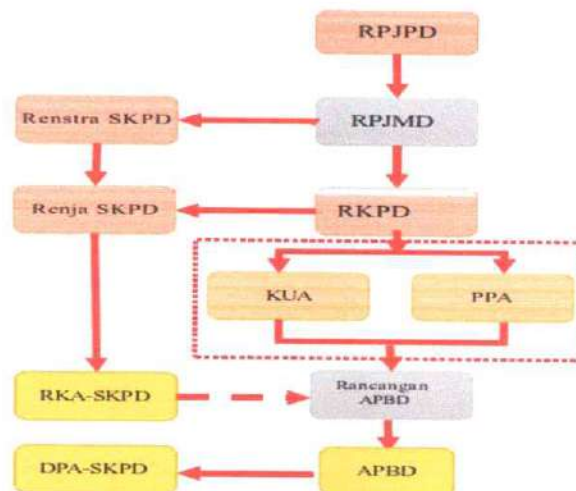
- 1) Tahapan Persiapan Penyusunan Renja-PD, dengan proses:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja-PD;
 - b. orientasi mengenai Renja-PD;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja-PD;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- 2) Tahapan Penyusunan Ranwal Renja-PD, dengan proses:

- a. PD menyusun ranwal Renja-PD paling lambat minggu pertama bulan Desember;
 - b. Penyusunan rancangan awal Renja-PD berpedoman pada Renstra-PD, hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan,
 - c. berpedoman pada Renstra-PD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dengan Renstra-PD;
 - d. berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra-PD;
 - e. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup: analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - f. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan penutup;
 - g. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
 - h. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD;
 - i. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum PD/lintas PD.
- 3) Tahapan Penyusunan Rancangan Renja-PD, dengan proses:
- a. Penyusunan rancangan Renja-PD merupakan proses menyempurnakan ranwal Renja-PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan Renja-PD;
 - b. Rancangan Renstra-PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD;
 - c. Rancangan Renja-PD disajikan dengan sesuai standar sistematika;
 - d. Rancangan Renja-PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD;

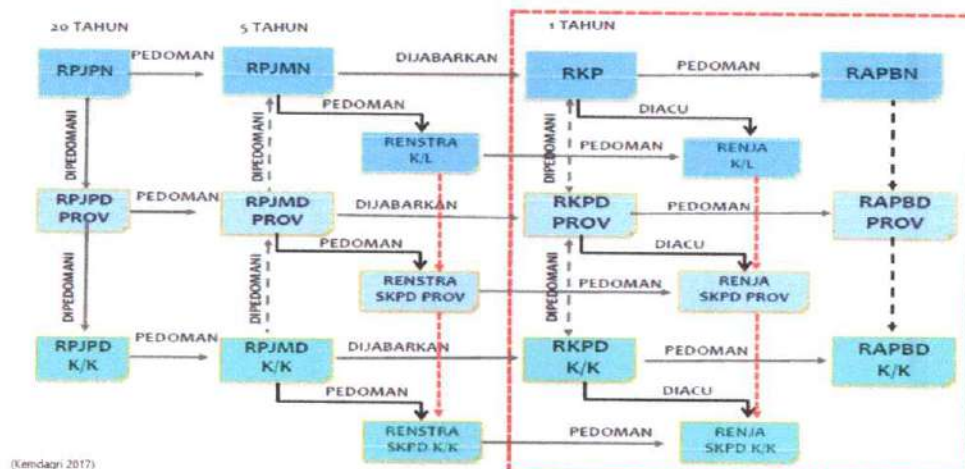
- e. Penyampaian Rancangan Renja-PD paling lambat minggu ketiga bulan Maret;
 - f. BAPPEDA diharuskan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja-PD, untuk dapat menjamin rancangan Renja-PD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD;
 - g. Apabila berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja-PD kepada PD;
 - h. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan tersebut, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renja-PD;
 - i. Rancangan Renja-PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA;
 - j. Verifikasi rancangan Renja-PD dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja-PD kepada BAPPEDA.
- 4) Tahapan Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD, dengan proses:
- a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA.
 - b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.
 - c. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja-PD.
 - d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima;
 - e. Hasil pembahasan rancangan Renja-PD dalam forum PD/lintas PD, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum PD/lintas PD.
- 5) Tahapan Perumusan Rancangan Akhir Renja-PD, dengan proses:
- a. Perumusan rancangan akhir Renja-PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja-PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD;
 - b. Perumusan rancangan akhir Renja-PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Persaturan Bupati tentang RKPD.
 - c. Rancangan akhir Renja-PD disajikan sesuai dengan sistematika.
- 6) Penetapan Renja-PD, dengan proses:
- a. Rancangan akhir Renja-PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi;
 - b. Rancangan akhir Renja-PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
 - c. Verifikasi yang dilakukan BAPPEDA, harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja-PD selaras dengan peraturan Bupati tentang RKPD dan Renja-PD lainnya;

- d. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD kepada kepala PD dan kepala PD harus melakukan penyempurnaan berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA;
- e. Rancangan akhir Renja-PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA.
- f. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja-PD, paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja-PD;
- g. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja-PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- h. Penetapan Renja-PD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.
- i. Renja-PD menjadi pedoman PD dalam menyusun RKA PD.

Tahapan dan proses penyusunan Renja-PD diatas menunjukkan hubungan dan keterkaitan Renja-PD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra-PD, RPJPD, RPJMD, RKPD dan Restra-PD, seperti pada gambar di bawah ini:



Selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan PD dan dokumen perencanaan daerah (kabupaten), Renja-PD juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi serta pusat, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja-PD ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang RPJP Kabupaten Sumbawa 2005-2025;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029; dan
- 27) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa)

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja-PD ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan PD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai ketentuan Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja Pemerintah Kabupaten Sumbawa
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

Kinerja pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ditentukan berdasarkan tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 sesuai dengan indikator kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan penelahaan terhadap rencana dan realisasi, maka diketahui sebagian besar target kinerja telah terpenuhi namun masih terdapat beberapa yang belum terpenuhi, yang dipengaruhi oleh beberapa kinerja yang belum optimal sehingga kinerja pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa menjadi belum optimal, sebagai berikut:

- a. Kategori Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (IS-1), berkinerja baik pada Tahun 2025 dengan menghasilkan rasio 1 (satu) pada Tahun 2025;
- b. Jumlah Omzet Koperasi dan Usaha Mikro (IS-2), berkinerja baik pada Tahun 2025 dengan menghasilkan rasio, yaitu sebesar 0.91 (nol koma sembilan satu);
- c. Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan (IS-3), berkinerja sangat baik pada Tahun 2025 dengan menghasilkan rasio sebesar 1.26 (satu koma dua enam);
- d. Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Bersertifikat (IS-4), berkinerja sangat baik pada Tahun 2025 dengan menghasilkan rasio sebesar 1.19 (satu koma satu sembilan);
- e. Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (IP-1), berkinerja sangat baik pada Tahun 2025 dengan menghasilkan nilai rasio sebesar 1.05 (satu koma nol lima);
- f. Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (IP-2), berkinerja sedang pada Tahun 2025 dengan menghasilkan rasio sebesar 0.87 (nol koma delapan tujuh);
- g. Jumlah Perusahaan yang Diawasi Norma Ketenagakerjaan (IP-3), berkinerja sedang pada Tahun 2020 dengan menghasilkan rasio sebesar 0.8 (nol koma delapan);
- h. Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan untuk pelatihan kerja dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (IP-4), berkinerja sangat baik pada Tahun 2025 dengan menghasilkan rasio sebesar 1 (satu);

- i. Persentase jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan perlindungan (IP-5), berkinerja sangat baik pada Tahun 2025 dengan menghasilkan rasio sebesar 1.04 (satu koma nol empat);
- j. Persentase Lulusan Pelatihan yang Bekerja atau Berwirausaha (IP-7), berkinerja sangat baik pada Tahun 2025 dengan menghasilkan rasio 1.81 (satu koma delapan satu);
- k. Persentase Pencari Kerja yang Difasilitasi Penempatan Pengembangan Usaha (IP-8), berkinerja baik pada Tahun 2025 dengan menghasilkan rasio 0.90 (satu koma Sembilan nol);
- l. Jumlah dokumen capaian kinerja Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang disusun (IP-9), masih berproses dan capaiannya nanti di akhir tahun;
- m. Persentase Informasi Pasar Kerja Kewenangan Kabupaten di SIINas(IP-10), berkinerja sangat baik pada Tahun 2025 dengan menghasilkan rasio 1.11 (satu koma sebelas);
- n. Persentase Perusahaan yang Memenuhi Standar Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko Swalayan) (IP-11) berkinerja baik pada Tahun 2025 dengan menghasilkan rasio 0.96 (nol koma sembilan enam);
- o. Jumlah laporan pengawasan ketenagakerjaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (IP-12) berkinerja sangat baik pada Tahun 2025 dengan menghasilkan rasio sebesar 1 (satu);
- p. Persentase alat – fasilitas pelatihan kerja dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IP-13) berkinerja baik pada Tahun 2025 dengan menghasilkan rasio 0.79 (nol koma tujuh sembilan).

Pada periode Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, diketahui terdapat sejumlah kegiatan/program anggarannya telah terealisasi sesuai rencana/alokasi dan sebaliknya juga terdapat realisasi yang tidak sesuai dengan jumlah rencana atau alokasi awal dalam APBD murni (DPA Murni) yang merupakan kesenjangan/gap terhadap alokasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Seluruh anggaran yang teralokasikan dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa ditujukan untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditentukan. Selanjutnya dengan melakukan perbandingan antara jumlah alokasi dengan jumlah realisasi dapat disajikan analisis terhadap rasio tersebut, yaitu:

- a. Terhadap pencapaian target indikator Kategori Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2021 terdapat rasio sebesar 1 (satu) dan pada tahun 2025 menghasilkan rasio 0.58 (nol koma lima delapan).
- b. Terhadap pencapaian target indikator Jumlah Omzet Koperasi dan Usaha Mikro, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan

peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2021 sebesar 1 (satu) dan pada tahun 2024 menghasilkan rasio 1.66 (satu koma enam enam). Sedangkan di tahun 2025 terjadi penurunan yaitu 0.43. Hal ini disebabkan oleh penyerapan anggaran masih rendah ditahun 2025 sampai bulan September.

- c. Terhadap pencapaian target indikator Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2021 terdapat rasio sebesar 1 (satu) dan pada tahun 2025 menghasilkan rasio 0.57 (nol koma lima tujuh).
- d. Terhadap pencapaian target indikator Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Bersertifikat Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2021 terdapat rasio sebesar 1.02 (satu koma nol dua) dan pada tahun 2025 menghasilkan rasio 0.06 (nol koma nol enam).
- e. Terhadap pencapaian target indikator Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial; Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2021 terdapat rasio sebesar 1 (satu) dan pada tahun 2025 menghasilkan rasio 7.44 (tujuh koma empat empat).
- f. Terhadap pencapaian target indikator Jumlah Perusahaan yang Diawasi Norma Ketenagakerjaan, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2021 terdapat rasio sebesar 1 (satu). Jumlah alokasi anggaran mengalami penurunan di tahun 2025.
- g. Terhadap pencapaian target indikator Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan untuk pelatihan kerja dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2021 terdapat rasio sebesar 1 (satu) dan pada tahun 2025 menghasilkan rasio 0.34 (nol koma tiga empat).
- h. Terhadap pencapaian target indikator Persentase jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan perlindungan, Rasio anggaran dan realisasinya dari tahun 2021 menghasilkan rasio sebesar 1 (satu) dan tahun 2025 menghasilkan rasio 0.22 (nol koma dua dua).
- i. Terhadap pencapaian target Persentase Lulusan Pelatihan yang Bekerja atau Berwirausaha, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan pada 2021 rasionya sebesar 1 (satu) dan Tahun 2025 menghasilkan Dari rasio 0.36 (nol koma tiga enam).
- j. Terhadap pencapaian target Persentase Lulusan Pelatihan yang Bekerja atau Berwirausaha, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan pada 2021 rasionya sebesar 1 (satu) dan Tahun 2025 menghasilkan Dari rasio 0.36 (nol koma tiga enam).
- k. Terhadap pencapaian target Persentase Pencari Kerja yang Difasilitasi Penempatan Pengembangan Usaha, Rasio anggaran dan realisasinya pada tahun 2021 dan Tahun 2022 menghasilkan rasio sebesar 1 (satu) sementara tahun 2025 masih 0 (nol). Hal ini

disebabkan adanya perubahan harga sehingga melakukan penyesuaian di APBDP.

- l. Terhadap pencapaian target Jumlah dokumen capaian kinerja Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang disusun, rasio anggaran dan realisasinya pada tahun 2021-2022 menghasilkan rasio 1 (satu) dan ditahun 2025 masih 0.05.
- m. Terhadap pencapaian target Persentase Informasi Pasar Kerja Kewenangan Kabupaten di SIINas, rasio anggaran dan realisasinya pada tahun 2022 menghasilkan rasio 1 (satu) dan ditahun 2025 masih 0.60.
- n. Terhadap pencapaian target Persentase Perusahaan yang Memenuhi Standar Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko Swalayan) rasio anggaran dan realisasinya pada tahun 2021-2022 menghasilkan rasio 1 (satu) dan Tahun 2025 dengan menghasilkan rasio 0.63 (nol koma enam tiga);
- o. Terhadap pencapaian target Jumlah laporan pengawasan ketenagakerjaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, rasio anggaran dan realisasinya mengalami peningkatan yaitu tahun 2021 sebesar 0.99 (nol koma Sembilan sembilan) dan Tahun 2025 dengan menghasilkan rasio sebesar 0.57 (nol koma lima tujuh);
- p. Terhadap pencapaian target Persentase alat – fasilitas pelatihan kerja dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku pada Tahun 2021-2022 menghasilkan rasio 1 (satu) dan tahun 2023-2025 mengalami penurunan dari 0.97 menjadi 0.41:

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disampaikan bahwa adanya rasio yang tinggi (di atas angka 1) atau bahkan yang rendah (dibawah angka 0.5) pada tahun-tahun tertentu, menjadi gap antara jumlah alokasi anggaran dengan jumlah realisasi anggaran. Berbagai faktor diketahui mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, misalnya adanya perubahan kebijakan dalam regulasi terkait yang berpengaruh pada adanya perubahan prosedur/mekanisme kerja, dinamisnya perpindahan (mutasi atau promosi) PNS yang berpengaruh pada jumlah dan kualitas personil (SDM).

Seluruh uraian terhadap kinerja penyelenggaran tugas dan kewenangan pada periode Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, secara umum meliputi: Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra-PD; dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut tersusun dalam Tabel T-C.29.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 Tahun 2024)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja-PD Tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Wakil Bupati Pelayanan Dasar									
Sekretariat									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Dinas nakertrans	80,3	74,15	80,1	82	100	80,2	81	100%
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	7	7	100	7	7	100%
Sub. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100%
Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100%
Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	0	0%
Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100%
Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	0	0%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana- PD Tahun 2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (t-2)				Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Rencana- PD Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana-PD s/d tahun berjalan (2025)	
			Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target Rencana- PD Tahun n-2 (2023)	Realisasi Rencana- PD Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100%
Sub. Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	100	3	3	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22	22	22	22	100	22	18	82%
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	46	46	48	95,38	48	48	100%
Sub. Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	100	12	9	75%
Sub. Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100%
Sub. Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100%
Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100%
Sub. Kegiatan Pengelolaan dan penyediaan bahan anggaran pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	1	1	100	1	1	100%
Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	13	13	13	13	100	13	9	69%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (ouput)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Program Capaian (Rencana- PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Rencana- PD Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Rencana- PD Tahun n-2 (2023)	Realisasi Rencana- PD Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sub. Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	2	2	100	2	2	100%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	3	0	0	0	3	3	100%
Perangkat Daerah									
Sub. Kegiatan Penyusunan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	0	0	0	1	1	100%
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	0	0	0	2	2	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100%
Sub. Kegiatan Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	1	1	1	100	1	1	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keluaran Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4	4	4	4	100	4	4	100%
Sub. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100%
Sub. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100%
Sub. Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	1	1	100	1	1	100%
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100%
Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	1	1	1	1	100	1	1	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana- PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lain (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Rencana- PD) Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Rencana- PD Tahun n-2 (2023)	Realisasi Rencana- PD Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sub. Kegiatan pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	7	1	1	100	2	2	100%
Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	0	0	0	2	2	100%
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	2	1	1	100	3	3	100%
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	760	689	0	0	0	760	1062	140%
Sub. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	1	1	100	3	3	100%
Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2	2	2	100	2	2	100%
Sub. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	6	6	6	6	100	6	6	100%
Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	16	18	0	0	0	16	16	100%
Sub. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0%
Bidang Kelengkapan									
Program Perencanaan Tenaga Kerja									
	Peningkatan Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Pemenuhan Rencana Tenaga Kerja Daerah (%)	43,07	39,33	40,16	40,6	101,1	43,07	37,45	87%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan										
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lain (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	70	55	60	67	111,67	70	70	100%	
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil										
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	75	45	45	55	100	45	50	100%	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	100	100	0	0	0	0	100	221	221%	
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dok Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	70	190	30	41	136,67	70	221	316%	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kab/Kota	Peningkatan Tenaga Kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri	120	0	0	0	0	120	0	0%	
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	10,4	6,4	7,75	7,88	101,66	10,4	9,37	90%	
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1935	1095	1365	1455	106,59	1935	1882	97%	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	290	260	270	360	133,33	290	429	148%		
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	0	0	0	0	1	0	0%	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Tersedia dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karr Hub)	1	0	0	0	0	1	0	0%	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 Tahun 2024)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja-PD Tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1	0	0	0	0	1	0	0%
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota		1	0	0	0	0	1	0	0%
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	1	0	0	0	0	1	0	0%
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	2,09	0	0	0	0	2,09	2,32	111%
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	30	0	0	0	0	30	169	563%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Capaian Kinerja Pemasangan Peralisihan HI di Daerah (%)	25	73	21	84	100	23	0	0%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Pelejaan Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota									
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WIKP Online	94,74	64,67	78,57	84,82	107,95	94,74	91,2	96%
Pendaftaran Pelejaan Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Pelejaan Kerja Bersama	100	100	100	100	100	100	100	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Program (Renstra-PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja-PD Tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekteja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2	2	2	6	300	2	8	400%
Pencapaian dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota		90	30	50	80	160	90	80	89%
Pencapaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10	10	10	10	100	10	10	100%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Perantara Perselisihan yang Terselamatkan	9	3	5	6	120	9	7	78%
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	3	3	3	3	100	3	3	100%
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kab/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dihina	3	3	3	3	100	3	3	100%
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1	1	1	1	100	1	1	100%
Bidang Transmigrasi									
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAT TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang dilatih dan diberikan penyuluhan	10	10	10	10	100	10	10	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Program (Rencana- PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Rencana- PD Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana-PD s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
				Target Rencana- PD Tahun n-2 (2023)	Realisasi Rencana- PD Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pemetaan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Pemetaan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten	1	1	1	1	100	1	1	100%	
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	25	25	25	25	100	25	25	100%	
Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	25	25	25	25	100	25	25	50%	
PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI KAWASAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Transmigrasi	6	6	6	6	100	6	6	100%	
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase SDM dan Sosek yang dikembangkan dalam rangka kemandirian SP	25	25	25	25	100	25	25	100%	
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah SDM Transmigran yang Didina	25	25	25	25	100	25	25	100%	
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1	1	1	1	100	1	1	100%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing yang disajikan dalam Tabel 2.2.

Kode	Indikator	IKK	Target Rencana Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	Per September Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01 202	1	Jumlah Orang yang Menerima Geji dan Tunjangan ASN	IKK Sub Keluaran	42	45	46	46	48	42	45	46	46	48	
01 202	2	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	IKK Sub Keluaran	1	5	5	5	5	1	5	5	5	5	
01 202	3	Jumlah Dok Penelausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	IKK Sub Keluaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
01 202	4	Jumlah Dok Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	IKK Sub Keluaran		6	6	6	6		6	6	6	6	
01 202	5	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	IKK Sub Keluaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
01 202	6	Jumlah Dok Baban Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	IKK Sub Keluaran		5	1	1	1		5	1	1	1	
01 202	7	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	IKK Sub Keluaran	1	6	6	6	6	1	6	6	6	6	
01 202	8	Jumlah Dok Pelap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	IKK Sub Keluaran	1	1	4	4	4	1	1	4	4	4	
01 206		Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKK Keluaran	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
01 206	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	IKK Sub Keluaran		1	4		4		1	4	4	4	
01 206	2	Jumlah Paket Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	IKK Sub Keluaran		1					1				
01 206	5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	IKK Sub Keluaran		1	1		1		1	1	1	1	

Kode	Indikator	IKK	Target Rencana Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analis
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	Per September Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01 206	8 Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKK Sub Keluaran		1					1					
01 206	9 Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKK Sub Keluaran		12	14	14	14		12	14	14	14	14	
01 207	Jumlah Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	IKK Keluaran		1	1	1	1		1	1	1	1	1	
01 207	6 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	IKK Sub Keluaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
01 208	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKK Keluaran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
01 208	1 Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKK Sub Keluaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
01 208	2 Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IKK Sub Keluaran	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
01 208	3 Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	IKK Sub Keluaran	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
01 209	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKK Keluaran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
01 209	2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	IKK Sub Keluaran	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
01 209	6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKK Sub Keluaran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
01 209	10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dikehambilitasi	IKK Sub Keluaran	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Tenaga Kerja	IKU	50	59,76	60	65	70	50,5	60	60,33	61	63		

Kode	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	Per September Tahun 2025		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	3												
02	Tingkat Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja Daerah	IKK Outcome	44.45	45.45	46.45	47.45	48.45	44.45	45.45	46.45	47.45	48.45		
02	Cakupan Perusahaan yang telah difasilitasi penyusunan RTK Makro dan mikro	IKK Keluaran		2	11,17		2		2	11,17		2		
02	01 Jumlah Dok Rencana Tenaga Kerja Makro	IKK Sub Keluaran		1			1		1			1		
02	02 Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	IKK Sub Keluaran	1		75		15	1		75		15		
03	Cakupan Tenaga Kerja Berkompetensi	IKK Keluaran	1.4	1.55	1.68	1.65	1.7	1.4	1.55	1.68	1.65	1.7		
03	01 Jumlah Naker yang mendapatkan sertifikat kompetensi	IKK Sub Keluaran	225	277	250	300	350	225	277	250	300	350		
03	01 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	IKK Sub Keluaran		300	250	300	350		300	250	300	350		
03	02 Jumlah Kespepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	IKK Sub Keluaran		1	1	1	1		1	1	1	1		
03	02 Cakupan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Difasilitasi Proses Akreditasi	IKK Keluaran	2.94	13.5	14,7			2.94	13.5	14,7				
03	01 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Didina	IKK Sub Keluaran	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
03	02 Cakupan perusahaan kecil yang mendapatkan pembinaan peningkatan produktivitas	IKK Keluaran	5.25	21.85	100,00	8.40	9.45	5.25	21.85	100,00	8.40	9.45		
03	01 Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	IKK Sub Keluaran	25	36	37	40	45	25	36	37	40	45		

Kode	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	Per September Tahun 2025		
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
04	Cakupan Penempatan Tenaga Kerja (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme pelayanan antar kerja	IKK Outcome	38.97	64.99	100	100	100	38.97	64.99	100	100	100		
04	Cakupan tenaga kerja yang mampu dilayani	IKK Keluaran		5	100	100	100		5	100	100	100		
04	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	IKK Sub Keluaran		15	550	550	500		15	550	550	500		
04	Tingkat penempatan CTK yang mendapatkan informasi dari pasar kerja	IKK Keluaran	1.00	2.00	100.00	4.00	5.00	1.00	2.00	100.00	4.00	5.00		
04	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	IKK Sub Keluaran	3	3	30	3	3	3	3	30	3	3		
04	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	IKK Sub Keluaran	500	750	500	1250	1500	500	750	500	1250	1500		
04	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	IKK Sub Keluaran			500		50			500		50		
04	Cakupan PMI yang mendapat pelayanan dan Perlindungan	IKK Keluaran	100	100	100	100	1000	100	100	100	100	1000		
04	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	IKK Sub Keluaran	500	500	120	950		500	500	120	950			
04	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	IKK Sub Keluaran	500	600	1650	700	750	500	600	1650	700	750		
04	Jumlah PMI Putra yang Diberdayakan	IKK Sub Keluaran	20	20	45	40	50	20	20	45	40	50		
05	Capaian kinerja penyelesaian Perselisihan HI	IKK Outcome	70.37	78.57	86.21	90.00	93.55	70.37	78.57	86.21	90.00	93.55		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Sampai dengan pelaporan kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, diketahui bahwa sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) lainnya telah tercapai targetnya. Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tantangan yang sangat berat di Tahun 2021 karena adanya pandemic COVID-19 yang berdampak pada pengurangan alokasi anggaran pada seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan. Pengurangan anggaran pada Tahun 2021 tersebut menjadikan dilakukan perubahan terhadap target kinerja karena adanya perubahan jumlah anggaran yang mempengaruhi pengurangan jumlah kelompok sasaran dari setiap sub kegiatan. kondisi Tahun 2021 tersebut berpotensi masih terjadi pada Tahun 2022, sehingga harus dilakukan penyesuaian yang fundamental terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Terkait dengan kedudukan, penyelenggaraan tugas fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa yang termuat dalam dokumen Renstra Dinas Tahun 2025-2029 adalah

1. Pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari pada kebutuhan dunia kerja.
2. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum berkualitas dan efektif.
3. Masih rendahnya cakupan layanan perlindungan tenaga kerja
4. Sarana prasarana Balai Latih Kerja belum memenuhi standar Minimal BLK

Permasalahan diatas berdampak pada implementasi berbagai kebijakan kepala Dinas. Maka sesuai kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa harus responsive terhadap hal tersebut, dan terkadang akan berpengaruh pada pengaturan ulang berbagai kegiatan yang senantiasa berkaitan erat dengan penganggaran.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, diketahui bahwa penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut telah berbasis RPJMD 2025-

2029 sebagai indikator kinerja pada level yang berkesesuaian. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan pengukuran dan pelaporan kinerja yang menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah. Demikian pula penentuan target kinerja, setiap target indikator kinerja yang bersifat direktif dari pemerintah pusat telah dipertimbangkan untuk menjadi dasar penentuan target kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan pencapaian visi, melalui pelaksanaan misi-misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 26 Tahun 2022 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah (kabupaten/kota) diberikan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib selanjutnya terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa selanjutnya diberikan kewenangan oleh regulasi untuk menyelenggarakan sub urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan ketenagakerjaan dan urusan pilihan transmigrasi.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa memiliki sejumlah tantangan dan peluang untuk mengembangkan kualitas atau kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat. Maka berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa dokumen yang berkaitan seperti Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, RTRW Kabupaten Sumbawa serta hasil analisis terhadap KLHS sebagaimana telah disajikan sebelumnya dalam dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, teridentifikasi beberapa hal yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa untuk periode Renstra selanjutnya yaitu periode Tahun 2025-2029. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian terhadap jumlah jenis pelayanan/penyelenggaraan tugas dan fungsi, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan

yang dibutuhkan. Hal itu sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa; dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.

Khusus berdasarkan hasil penelaahan terhadap RTRW Kabupaten Sumbawa, teridentifikasi bahwa RTRW Kabupaten Sumbawa tersebut berimplikasi bagi pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Demikian juga berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Sumbawa yang disajikan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi bahwa hasil KLHS RPJMD Kabupaten Sumbawa tersebut berimplikasi bagi pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029, adalah sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju Terwujudnya Kabupaten Sumbawayang Unggul, Maju dan Sejahtera. Secara konsep, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 telah mengarusutamakan sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Uraian di atas, merupakan suatu tantangan dan tuntutan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala daerah agar dapat mengimplementasikan kebijakannya khususnya untuk mencapai suatu kondisi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa harus memperhatikan berbagai rekomendasi dalam dokumen RTRW dan KLHS sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2025. RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 tersebut ditetapkan setelah melalui proses Panjang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan di daerah, yaitu dimulai atau diawali oleh pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun (musdus) pada setiap desa dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan pada setiap kelurahan. Reviu yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa terhadap RKPD Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu tahapan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, dimana proses yang dilakukan adalah melakukan pembandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses tersebut di atas dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, untuk memastikan bahwa telah terjadi keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta sasaran pembangunan daerah dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu perangkat daerah pelaksana program-program prioritas daerah. Proses reviu juga dimaksudkan untuk mengklarifikasikan berbagai usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kota dilaksanakan yang berkesesuaian dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.

Dari proses reviu terhadap RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, terdapat beberapa temuan yang menjadi catatan penting, antara lain:

- a. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat perbedaan indikator antara RPJMD dengan RKPD sehingga perlu penyesuaian indikator RKPD di rancangan akhir RKPD sesuai dengan RPJMD;
- b. Pada Program Pendidikan dan Latihan terdapat perbedaan indikator antara RPJMD dengan RKPD sehingga perlu penyesuaian indikator RKPD di rancangan akhir RKPD sesuai dengan RPJMD;
- c. Pada Program Pengembangan tenaga kerja Latihan terdapat perbedaan indikator antara RPJMD dengan RKPD sehingga perlu penyesuaian indikator RKPD di rancangan akhir RKPD sesuai dengan RPJMD;
- d. Pada Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan terdapat perbedaan indikator antara RPJMD dengan RKPD sehingga perlu penyesuaian indikator RKPD di rancangan akhir RKPD sesuai dengan RPJMD;
- e. Pada Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen terdapat perbedaan indikator antara RPJMD dengan RKPD sehingga perlu penyesuaian indikator RKPD di rancangan akhir RKPD sesuai dengan RPJMD.

Berdasarkan catatan hasil penelahaan di atas, maka secara umum RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 khusus yang berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 pada penyajian dalam Tabel 2.3

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF
SEKRETARIAT					SEKRETARIAT				
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempeh	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Poin)	74	6.051.496.164,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempeh	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Poin)	74	6.051.496.164,00
A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempeh		8	21.540.960,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempeh		8	21.540.960,00
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempeh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.284.660,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempeh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.284.660,00
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempeh	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	2.884.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempeh	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	2.884.200,00

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
N o	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2.417.800,0 0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2.417.800,0 0	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.353.000,0 0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.353.000,0 0	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.152.800,0 0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.152.800,0 0	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1.408.000,0 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1.408.000,0 0	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF
7 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2.040.500,00	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2.040.500,00
B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h		1	5.291.941,534,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h		1	5.291.941,534,00
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	5.197.180,284,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	5.197.180,284,00
	2 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	83.920.000,00	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	83.920.000,00
3 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1.837.500,00	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1.837.500,00

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
N o	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF	
		Lempe h					Lempe h				
4	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	6	1.837.500,0 0	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	6	1.837.500,0 0	
5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2.205.000,0 0	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2.205.000,0 0	
6	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	6	2.388.750,0 0	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	6	2.388.750,0 0	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF
7 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	2.572.500,00	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	2.572.500,00
C Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			185.139.340,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			185.139.340,00
1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	15.285.625,00	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	15.285.625,00
2 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	50.061.375,00	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	50.061.375,00
3 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	9.293.690,00	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	9.293.690,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
N 0	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF
		Lempe h					Lempe h			
4	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	14	100.498.65 0,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	14	100.498.65 0,00
5	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	15	10.000.000, 00	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	15	10.000.000, 00
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			25.750.000, 00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			25.750.000, 00
1	Tersediannya Mebel	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		10.000.000, 00	Tersediannya Mebel	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		10.000.000, 00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF
2 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	15.750.000,00	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	15.750.000,00
E Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			302.313.825,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			302.313.825,00
1 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	32.913.825,00	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	32.913.825,00
2 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	252.000.000,00	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	252.000.000,00
3 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	17.400.000,00	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	17.400.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF
	Lempeh					Lempeh			
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			224.810.505,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempeh			224.810.505,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	70.292.900,00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Sumba wa, Lempeh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya (Unit)	10	70.292.900,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	7.800.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempeh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	7.800.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	1	100.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempeh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	1	100.000.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF	
4	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sumba Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	46.717.605,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sumba Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	46.717.605,00
URUSAN KETENAGAKERJAAN					URUSAN KETENAGAKERJAAN					
I	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kab. Sumba Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Cakupan Perusahaan yang telah difasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan mikro (%)	1,22	101.415.033,00	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kab. Sumba Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Cakupan Perusahaan yang telah difasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan mikro (%)	1,22	101.415.033,00
A	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Sumba Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			101.415.033,00	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Sumba Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			101.415.033,00
1	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sumba Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	1.415.033,00	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sumba Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	1.415.033,00
2	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sumba Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	25	100.000.000,00	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sumba Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	25	100.000.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
N o	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF
		wa, Lempe h					wa, Lempe h			
II	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Cakupan Tenaga Kerja Non Konstruksi Bersertifikat Kompetensi (%)	1,5	3.179.332.293,00	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Cakupan Tenaga Kerja Non Konstruksi Bersertifikat Kompetensi (%)	1,5	3.179.332.293,00
A	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			3.017.915.845,00	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			3.017.915.845,00
I	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	280	3.017.915.845,00	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	280	3.017.915.845,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF
2 Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2	0	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2	0
B 2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			33.000.000,00	2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			33.000.000,00
I Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	7	33.000.000,00	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	7	33.000.000,00
C 2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			128.416,448,00	2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			128.416,448,00

RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
N o	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF
1	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	37	128.416,44 8,00	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	37	128.416,44 8,00
II I	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Cakupan penempatan tenaga kerja (%)	87,78	242.326.50 0,00	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Cakupan penempatan tenaga kerja (%)	87,78	242.326.50 0,00
A	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			88.134.148, 00	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			88.134.148, 00
1	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	3	15.864.147, 00	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	3	15.864.147, 00
2	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumba wa, Sumba wa,	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.030	14.982.805, 00	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumba wa, Sumba wa,	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.030	14.982.805, 00

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
N o	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF	
		Lempe h					Lempe h				
3	Terlaksananya Job Fair/ Bursa Kerja	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja (Orang)	70	57.287.196, 00	Terlaksananya Job Fair/ Bursa Kerja	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja (Orang)	70	57.287.196, 00	
B	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			154.192.35 2,00	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			154.192.35 2,00	
1	Terlaksananya Peningkatan dan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	450	35.000.000, 00	Terlaksananya Peningkatan dan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	450	35.000.000, 00	

RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF
2 Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	1.570	55.500.000,00	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	1.570	55.500.000,00
3 Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	40	63.692.352,00	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	40	63.692.352,00
1.020.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Cakupan perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (%)	19	164.128.452,00	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Cakupan perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (%)	19	164.128.452,00
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			127.418.952,00	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			127.418.952,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF
1 Tertindakannya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	15	7.320.952,00	Tertindakannya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	15	7.320.952,00
2 Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	120.098.000,00	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	120.098.000,00
B Tertindakannya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			36.709.500,00	Tertindakannya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h			36.709.500,00
1 Tertindakannya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	15	21.403.000,00	Tertindakannya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	15	21.403.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
N o	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF
	pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	15	15.306.500,00	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	15	15.306.500,00
3	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)		0	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)		0
URUSAN TRANSMIGRASI						URUSAN TRANSMIGRASI				
I	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Cakupan Kinerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi (%)	100	75.586.829,00	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Cakupan Kinerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi (%)	100	75.586.829,00
A	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kab. Sumba wa, Sumba			75.586.829,00	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kab. Sumba wa, Sumba			75.586.829,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
N o	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	LOKAS I	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF	
		wa, Lempe h					wa, Lempe h				
1	Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	20	22.676.048, 70	Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	20	22.676.048, 70	
2	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	1	52.910.780, 30	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kab. Sumba wa, Sumba wa, Lempe h	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	1	52.910.780, 30	
TOTAL ANGGARAN					9.814.285.2 71,00	TOTAL ANGGARAN					9.814.285.2 71,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah lainnya di Kabupaten Sumbawa yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi lainnya, termasuk hasil pelaksanaan dari Musrenbang RKPD Kabupaten Sumbawa dan pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, dapat disajikan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dan menjadi bagian dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa:

usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa adalah yang berkaitan dengan pemberian hibah kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat. Alur atau mekanisme hibah atau bantuan sosial kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat menjadi output pada 3 (tiga) sub kegiatan dalam DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. pengajuan proposal awal dari masyarakat/kelompok masyarakat disampaikan kepada Bupati Sumbawa dengan tembusan kepada Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa;
- b. Bupati Sumbawa akan memberikan disposisi pada perangkat daerah yang terkait atau berkesuaian dengan proposal, diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa;
- c. Apabila disposisi Bupati Sumbawa diturunkan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan hibah tersebut;
- d. selain verifikasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa juga akan melakukan evaluasi terhadap calon penerima bantuan hibah;
- e. setelah proposal di evaluasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, maka akan dilakukan re-evaluasi oleh TAPD Kabupaten Sumbawa;
- f. setelah TAPD melakukan evaluasi dan telah diterima, maka permohonan di atas akan menjadi bagian dalam RKA dan akan ditetapkan menjadi DPA;

- g. berdasarkan DPA tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa akan mengajukan rancangan SK Bupati Sumbawa tentang penerima bantuan hibah.

Selain dari usulan kelompok kepentingan, pemberian hibah yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa juga berasal dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang diperoleh dari proses reses. Khusus untuk usulan pokir, data calon penerima bantuan hibah atau bansos akan diberikan oleh TAPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa yang telah dilengkapi dengan jenis program unggulan beserta nilai anggarannya untuk di input dalam aplikasi SIPD. Data penerima hibah yang sudah masuk dalam SIPD akan di verifikasi dan dievaluasi kembali oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa untuk memastikan bahwa badan/lembaga/organisasi masyarakat tersebut tidak fiktif, sesuai dengan alamat yang tertera dalam proposal serta memastikan bahwa RAB yang diajukan oleh calon penerima hibah benar atau sesuai dengan yang dituangkan dalam proposal permohonan bantuan. Setelah semuanya terverifikasi dan terevaluasi maka langkah selanjutnya adalah pembuatan SK Penerima Hibah.

Setelah SK terbit maka penerima hibah akan mengajukan permohonan pencairan.

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, seluruh usulan pemangku kepentingan yang masuk menjadi bagian dalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/Non State Actors.

Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif pelatihan kerja.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

8. Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan tenaga kerja melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif- karakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga

Berdasarkan Misi/Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan tenaga kerja melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif- karakteristik-mandiri lainnya dan Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

3.2 . Tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 terdapat tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa yang ingin diwujudkan dalam periode tahun 2025-2029 yaitu :

Meningkatnya Kapasitas, Kualitas dan perlindungan tenaga kerja serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Agar pencapaian tujuan dapat dimonitor maka dirumuskan kondisi-konsisi (sasaran) yang harus tercipta sebelum tujuan utama terwujud. Sasaran yang dirumuskan untuk pencapaian tujuan Meningkatkan Kapasitas, Kualitas dan perlindungan tenaga kerja serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah :

1. Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan Kewirausahaan tenaga kerja termasuk pekerja rentan,
2. Meningkatkan jaminan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin,
3. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas
5. Meningkatkan pemerataan pendapatan Masyarakat
6. Meningkatkan perlindungan dan penjaminan sosial bagi masyarakat
7. Meningkatkan serapan tenaga kerja

Menurut ketentuan Pasal 170 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya, sebagai salah satu instrumen monitoring, maka setiap tujuan dan sasaran memiliki indikator dan target capaian. Pencapaian target tujuan dan sasaran akan menjadi ukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya. Tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Kabupaten

Sumbawa pada tahun 2026 sesuai Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026
Meningkatnya Kapasitas, Kualitas dan perlindungan tenaga kerja serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (poin)	82,81
		Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)	3,437
		Universal Coverege Jamsostek (UCJ) (%)	21,24
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	76,14
		Tingkat Serapan Tenaga Kerja (%)	28,12
		Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)	10.936
	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Sedang
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Kategori AKIP PD (Kategori)	B
	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja ()	97,57
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase Perlindungan Tenaga Kerja (%)	37,29

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu

atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa merupakan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan misi ketiga yaitu Sumbawa Bersih Melayani untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (sub output) dalam rangka mencapai keluaran (output) suatu kegiatan.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, selain memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa juga memperhatikan beberapa hal lainnya yang jug am menjadi amanat pemerintah pusat, antara lain:
 - a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b) Pencapaian SDGs,
 - c) Pengentasan kemiskinan,
 - d) Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan
 - f) Pengembangan daerah terisolir.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan:
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya, pada tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa melaksanakan 4 (empat) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan berpedoman kepada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dan telah beberapa kali dimutakhirkan, terakhir dimutakhirkan dengan Kepmendagri nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Total pagu yang dibutuhkan sebanyak Rp.24,887,492,317.00 (Dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Mebel
- Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

A. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

- Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro
- Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

A. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
- Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta

B. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

C. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

- Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

A. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja pada Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
- Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
- Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja

B. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)

- Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi CPMI/PMI
- Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
- Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan

5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

A. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online
- Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial serta Kepesertaan Jamsostek

B. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

- terselesaikannya perselisihan hubungan industrial
- terlaksananya pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja

6. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

A. Pengembangan Satuan Permukiman Tahap Kemandirian

- terwujudnya penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman
- terwujudnya penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan permukiman

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya disajikan dalam Tabel 4.1.

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027

KODE		BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU	
			LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF
SEKRETARIAT										
071	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Poin)	74	6.051.496.164,00	APBD		76	6.442.926.071,00	
071	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	8	21.540.960,00	APBD		8	23.695.057,00	
071	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	2	10.284.660,00	APBD		2	11.313.127,00	
071	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	1	2.884.200,00	APBD		1	3.172.620,00	

KODE				BIDANG-URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN/OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026		CATATAN		PERKIRAAN MAJU		
				LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF
2 7 1 2 1 3				Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempoh	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2.417.800,00	APBD		1	2.659.580,00
2 7 1 2 1 4				Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempoh	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.353.000,00	APBD		1	1.488.300,00
2 7 1 2 1 5				Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempoh	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.152.800,00	APBD		1	1.268.080,00
2 7 1 2 1 6				Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempoh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1.408.000,00	APBD		1	1.548.800,00

KODE				BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF
2	0	0	0	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2.040.500,00	APBD		1	2.244.550,00
2	7	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh		1	5.291.941.534,00	APBD			5.448.336.147,00
2	0	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	5.197.180.284,00	APBD		46	5.342.701.332,00
2	7	1	2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	83.920.000,00	APBD		5	93.709.440,00
2	0	0	0	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1.837.500,00	APBD		1	2.021.250,00
2	7	1	2	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	6	1.837.500,00	APBD		6	2.021.250,00

KODE				RENCANA TAHUN 2026					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT				LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF
2	0	0	0	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2.205.000,00	APBD		1 2.425.500,00
2	7	1	2	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6	2.388.750,00	APBD		6 2.627.625,00
2	0	0	0	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	2.572.500,00	APBD		4 2.829.750,00
2	0	0	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh			185.139.340,00	APBD		206.710.400,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN-OUTPUT				RENCANA TAHUN 2026				CATATAN				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
KODE				LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF				
2	7	1	2	Kab. Sumbawa, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	15.285.625,00	APBD		4	19.871.313,00				
2	7	1	2	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	50.061.375,00	APBD		1	55.067.513,00				
2	7	1	2	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	9.293.690,00	APBD		1	10.223.059,00				
2	7	1	2	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	14	100.498.650,00	APBD		14	110.548.515,00				
2	7	1	2	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	15	10.000.000,00	APBD		20	11.000.000,00				
2	7	1	2	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Pengadaan Barang Mutik Daerah Peningkat, Urusan Pemerintahan Daerah		25.750.000,00	APBD			29.825.000,00				

KODE				RENCANA TAHUN 2026					CATATAN PENTING		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT				LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
				a, Lempoh								
0 7 1 2 0 000			Tersedianya Mebel	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		10.000.000,00	APBD			12.500.000,00	
0 7 1 2 0 000			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	15.750.000,00	APBD		1	17.325.000,00	
0 7 1 2 0 000			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh			302.313.825,00	APBD			308.305.203,00	
0 7 1 2 0 000			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	32.913.825,00	APBD		1	36.205.208,00	
0 7 1 2 0 000			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lempoh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	252.000.000,00	APBD		1	252.959.995,00	

KODE				RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
0701	01	02	001	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempoh	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	1	46.717.605,00	APBD	1	60.735.268,00
URUSAN TENAGA KERJA										
0702	02	03		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempoh	Cakupan Perusahaan yang telah difasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan mikro (%)	1,22	101.415.033,00	APBD	1,25	126.768.791,00
0702	02	04		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempoh			101.415.033,00	APBD		126.768.791,00
0702	02	05	000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempoh	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	1.415.033,00	APBD	1	26.768.791,00
0702	02	06	000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempoh	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	25	100.000.000,00	APBD	25	100.000.000,00

KODE				RENCANA TAHUN 2026					CATATAN PENTING		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT				LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
2	0	0		Kab. Sumbawa, Sumbawa a, Lembeh	Cakupan Tenaga Kerja Non Konstruksi Bersertifikat Kompetensi (%)	1,5	3.179.332.293,00	APBD		1,6	3.307.459.384,00	
				Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lembeh			3.017.915.845,00	APBD			3.138.632.478,00	
2	0	0	0	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lembeh	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	280	3.017.915.845,00	APBD		284	3.138.632.478,00	
2	0	0	0	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lembeh	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2		APBD		2	0	
				Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lembeh			33.000.000,00	APBD			34.650.000,00	

KODE				BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET	PAGU INDIKATIF
2	0	0	0	000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lembeh	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	7	33.000.000,00	APBD			7	34.650.000,00
2	7	3	2	2	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lembeh			128.416.448,00	APBD				134.176.906,00
2	0	0	0	0	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lembeh	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	37	128.416.448,00	APBD			38	134.176.906,00
2	7	3	2	4	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lembeh			242.326.500,00	APBD			92,73	282.912.500,00
2	0	0	0	0	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lembeh			88.134.148,00	APBD				102.895.277,00
2	7	4	2	3	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lembeh	Jumlah Data dan Informasi yang Dihilaskan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	3	15.864.147,00	APBD			3	18.521.150,00

KODE				BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
					LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
2	0	0	0	000	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lembeh	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	1.570	55.500.000,00	APBD		1.585	63.006.028,00
2	0	0	0	000	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lembeh	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	40	63.692.352,00	APBD		60	81.007.750,00
2	0	0			2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lembeh	Cakupan perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (%)	19	164.128.452,00	APBD		21	167.628.452,00
2	0	0	0		2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perijinan Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lembeh			127.418.952,00	APBD			127.418.952,00
2	0	0	0	000	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Sumbawa a, Sumbawa a, Lembeh	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	15	7.320.952,00	APBD		20	7.320.952,00

KODE				BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF
2	0	0	0	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempoh	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	120.098.000,00	APBD		1	120.098.000,00
2	7	5	2	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempoh			36.709.500,00	APBD			40.209.500,00
2	0	0	0	Tertaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 Kabupaten/Kota	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempoh	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	15	21.403.000,00	APBD		20	21.403.000,00
2	7	5	2	Terselenggaranya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 Kabupaten/Kota	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Lempoh	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan (Perkara)	15	15.306.500,00	APBD		10	18.806.500,00
2	0	0	0									
2	7	5	2									

KODE				BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
					LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF	
2	0	0	0	000	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumbaw a, Sumbaw a, Lembeh	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)				0		
3	3				URUSAN TRANSMIGRASI								
3	2					Kab. Sumbaw a, Sumbaw a, Lembeh	Cakupan Kinerja Penguatan Kawasan Transmigrasi (%)	100	75.586.829,00	APBD		100	78.836.829,00
3	2	0	0			Kab. Sumbaw a, Sumbaw a, Lembeh			75.586.829,00	APBD			78.836.829,00
3	2	4	2	1		Kab. Sumbaw a, Sumbaw a, Lembeh	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	20	22.676.048,70	APBD		25	23.651.049,00
3	2	4	2	1		Kab. Sumbaw a, Sumbaw a, Lembeh	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	1	52.910.780,30	APBD		1	55.185.780,00

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / SUBKEGIATAN/OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARG ET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARG ET	PAGU INDIKATIF
					9.814.285.271 ,00			10.406.532.02 7,00

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 ini merupakan sebuah rencana kerja ideal yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, baik dari sisi indikator, target serta indikasi pendanaan. Maka kualitas atau kuantitas kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai sumberdaya sebagai input, di antaranya anggaran. Dalam konsepsi sumber daya organisasi, tata kelola sebuah organisasi pemerintahan tentu melibatkan berbagai sumberdaya yang merupakan aset organisasi tersebut, misalnya konsep "5m+1i" (Man; Money; Material; Machine; Methode; Information), dimana 5m tersebut adalah sumber daya fisik yang berwujud, sedangkan informasi merupakan sumber daya konseptual. Sumber daya konseptual ini dipakai oleh para penyelenggara pemerintahan untuk mengelola sumber daya fisik. Sumber daya informasi bukan hanya informasi dan data, tetapi juga terkait dengan sejumlah peralatan pendukungnya seperti perangkat keras dan lunak komputer, database, jaringan, dan lain-lain.

Sumber daya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, secara terus menerus di tata ulang agar siap pakai terutama ketika terjadi suatu perubahan agar tetap dapat cepat beroperasi dan selalu dapat menghasilkan daya guna atau manfaat yang lebih tinggi atau semakin baik. Misalnya pelatihan pegawai, yang merupakan usaha untuk memperbaiki sumber daya manusia, penggantian mesin lama dengan mesin baru yang lebih modern. Semua usaha tersebut ditujukan untuk memaksimalkan penggunaan tiap sumber daya, meminimalkan waktu yang terbuang, serta mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas setiap unit kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang optimal, harus diupayakan tersedia atau terpenuhinya seluruh sumber daya yang berkesesuaian. Tidak hanya dalam hal ketersediaan, namun tata Kelola atau manajemen yang baik katas seluruh sumber daya yang dimiliki turut serta mempengaruhi tingkat keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 ini disusun sesuai amanat perundang-undangan yang terkait dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a) Bahwa Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 merupakan implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

- Sumbawa. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan, dikendalikan sepenuhnya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa selaku kepala PD dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b) Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2026 Kabupaten Sumbawa;
 - c) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 dilaksanakan secara akuntabel dan hasilnya akan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik dari seluruh aparatur sipil negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya, dibutuhkan suatu rencana tindak lanjut yang tepat dan terarah atas seluruh hal yang telah direncanakan dalam dokumen ini. Perencanaan yang baik merupakan setengah dari keberhasilan, maka dengan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pada tahun berkenaan. Dengan terlaksananya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan diharapkan akan tercapai tujuan, sasaran, manfaat, hasil, dan keluaran melalui tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat.

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT